



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/05/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN *SIDE/PARALLEL EVENT*
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA PERTEMUAN TAHUNAN
INTERNATIONAL MONETARY FUND- WORLD BANK GROUP
TAHUN 2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan pertemuan tahunan *International Monetary Fund (IMF) - World Bank Group* tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pertemuan tahunan *IMF-World Bank Group* tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan *Side/Parallel Event* yang melibatkan lintas *stakeholder*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan *Side/ Parallel Event* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund- World Bank Group* Tahun 2018;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Penyelenggaraan *Side/ Parallel Event* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional pada Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund- World Bank Group* Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN *SIDE/ PARALLEL EVENT* KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA PERTEMUAN TAHUNAN *INTERNATIONAL MONETARY FUND- WORLD BANK GROUP* TAHUN 2018.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggaraan *Side/ Parallel Event* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund- World Bank Group* Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja (Pokja).

KETIGA : ...

- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan pertemuan tahunan IMF - *World Bank Group* tahun 2018;
 - b. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pertemuan tahunan IMF - *World Bank Group* tahun 2018; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Pokja terdiri atas:
- a. Pokja 1, dengan topik *Low Carbon Development and Green Economy*;
 - b. Pokja 2, dengan topik *The 4th High-Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing (HLM4)*;
 - c. Pokja 3, dengan topik *Inclusive Economic Growth: Poverty & Inequality*;
 - d. Pokja 4, dengan topik *Sustainable Development Goals Knowledge Platform: ASEAN Forum for Minister Responsible for Development Planning on Implementing Sustainable Development Goals dan Localizing the Implementation of the Sustainable Development Goals: Act Locally on a Global Scale*; dan
 - e. Pokja 5, dengan topik *Developing Resilient and Dynamic Rural Areas*.
- KETUJUH : Pokja bertugas:
- a. membuat rencana kegiatan Pokja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam penyiapan dan mengolah bahan;
 - c. melaksanakan rangkaian kegiatan persiapan *side/parallel event* sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan strategi komunikasi *parallel event* kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan *side/parallel event* sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2018.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/05/2018

TANGGAL 11 MEI 2018

PANITIA PENYELENGGARAAN *SIDE/PARALLEL EVENT*
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA PERTEMUAN TAHUNAN
INTERNATIONAL MONETARY FUND- WORLD BANK GROUP
TAHUN 2018

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNGJAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris 1 : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris 2 : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. POKJA ...

D. POKJA

1. Pokja 1 *Low Carbon Development and Green Economy*

- Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Konservasi Energi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Subdirektorat Multilateral 2, Kementerian PPN/Bappenas;
12. *Country Representatives, Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia*;
13. Ida Suriany, *UK Climate Change Unit (UKCCU)*;
14. Direktur Eksekutif, *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*;
15. Danifansen Simanjuntak, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Pokja 2 *The 4th High-Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing (HLM4)*

- Ketua : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kasubdit Kerja Sama Pembangunan Global, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 5. Direktur Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri;
 6. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri;
 7. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
 8. Direktur Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara;
 9. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
 10. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Kementerian Keuangan;
 11. Direktur Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian;
 13. Dinur Krismasari, *Senior Representative*, JICA Indonesia;
 14. Steffen Soulejman Janus, *Senior Officer, Program Leader Knowledge Hub*, World Bank;
 15. Dr. Hirbod Aminlari, *Principal Advisor South-South and Triangular Cooperation-Networks for Global Governance (SSTC-NGG)*, GIZ Indonesia;
 16. Riad Raqueeb, *Manager Institutional Capacity Development Department*, Islamic Development Bank;
 17. Yahya Luping, *South-South and Triangular Specialist, US Agency for International Development (USAID)* Indonesia.
3. Pokja 3 *Inclusive Economic Growth: Poverty & Inequality*
- Ketua : Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Lembaga Penelitian, *SMERU Research Institute*;
 7. Kepala Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Fiska Miswari Aulia, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Riski Raisa Putra, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Indira Widiesa, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Arif Darmawan, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Widyastuti Hardaningtyas, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
4. *Pokja 4 Sustainable Development Goals Knowledge Platform: ASEAN Forum for Minister Responsible for Development Planning on Implementing Sustainable Development Goals dan Localizing the Implementation of the Sustainable Development Goals: Act Locally on a Global Scale*
- Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;

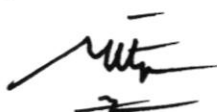
8. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. *Team Leader*, Sekretariat TPB/SDGs;
 11. Juliaty Ansye Sopacua, *Technical Advisor* SDGs, UNDP Indonesia;
 12. Tati Raksodewanto, JICA;
 13. Barlev Nicodemus Hutagalung, ADB Indonesia.
5. Pokja 5 *Developing Resilient and Dynamic Rural Areas*
- Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : 1. Kasubdit Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kasubdit Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;
6. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Ir. Kuswiyanto, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Ir. Hermani Wahab, M.Sc.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati